



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

EVALUASI FUNGSI LURAH DALAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

EZY NOVRIAN FAUZIAH

Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : ezynovrianfauziah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Lurah Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Di karenakan terdapat permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mengganggu kepada masyarakat. Teknik penarikan sampel menggunakan metode Purposive Sumpling yang mana teknik dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yang mana jumlah informan sebanyak 10 orang. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah Penelitian Kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian diolah dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Fungsi Lurah Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Cukup Baik karena masih terdapat beberapa kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara di lapangan yang menunjukkan Fungsi Lurah Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang mana dalam hal Ketentraman dan Ketertiban Umum masih terdapat kekurangan.

Kata Kunci : Evaluasi Fungsi Lurah, Ketentraman dan Ketertiban

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the function of the village head in the implementation of public peace and order in Simpang Tiga Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. This is because there are problems of Public Order and Order that disturb the community. The sampling technique uses the Purposive Sampling method which is a technique with determining the sample with certain considerations, in which the number of informants is 10 people. The type of research used in this study is qualitative research. The data analysis used is descriptive qualitative, namely analyzing data obtained from the results of the interview, then processed and then the author draws conclusions from the results of processing the data. The results of this study can be concluded that the evaluation of the function of the village head in the implementation of public peace and order in Simpang Tiga Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency is quite good because there are still some shortcomings. This can be seen from the results of interviews in the field which show the function of the village head in the implementation of public peace and order in Simpang Tiga Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, which in terms of Peace and Public Order there are still shortcomings.

Keywords : Evaluation of the function of the village head, peace and order



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintah negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 229 dijabarkan mengenai Kelurahan yakni Lurah diangkat selaku kepala kelurahan serta perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat dan dilantik oleh bupati/walikota serta bertugas membantu camat dalam banyak hal.

Pemerintah Kelurahan juga harus cepat dan tanggap dalam memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan warga masyarakat. Diharapkan dengan terciptanya pemerintah kelurahan yang tangguh dan mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat mewujudkan program-program pembangunan yang terencana secara efektif dan efisien yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan sejahtera.

Untuk itu melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 5 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, lurah mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Berdasarkan tugas-tugas tersebut, maka Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu Pemerintah Kelurahan yang ada di Kota Teluk Kuantan tentunya harus berupaya untuk dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam ketentraman dan ketertiban umum antara lain meliputi :

1. Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
3. Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota.

Lurah sebagai pemimpin formal yang langsung berhadapan dengan masyarakat, melaksanakan teknis administrasi Pemerintahan dan tugas pembangunan di kelurahan. Maka dari itu kemampuan seorang lurah dalam memimpin kelurahan sangat diperlukan guna menggali dan mengembangkan potensi serta memberdayakan masyarakatnya sehingga



dengan demikian diharapkan agar pembangunan yang dikehendaki oleh pemerintah dan diperlukan oleh masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Ketenteraman dan ketertiban umum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, Lurah dalam melaksanakan fungsinya mempunyai kewenangan urusan pemerintahan yang di limpahkan oleh Camat dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang di limpahkan. Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya. Masalah yang ada di Kelurahan Simpang Tiga ini contohnya seperti :

1. Ada beberapa orang yang berjualan di kaki lima (trotoar), itu dapat mengakibatkan susahny pejalan kaki yang hendak melewatinya. Sebab kaki lima di buat untuk tempat pejalan kaki bukan tempat untuk berjualan.
2. Parkir di sembarang tempat, seperti di tritoar dan di tepi jalan yang bukan tempat parkir.
3. Adanya masyarakat yang mengendarai sepeda motor ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi (ngebut) serta merubah bunyi kendaraannya (knalpot) menjadi lebih besar dan itu membuat kebisingan yang dapat mengganggu masyarakat di lingkungan setekitar.
4. Banyaknya sampah yang berserakan di lingkungan sekitar jalan raya seperti sampah plastik hingga dedaunan yang berguguran yang dapat merusak keindahan lingkungan.
5. Serta adanya maling/begal yang terjadi di Kelurahan Simpang Tiga yang mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman di rumah maupun diluar rumah.

Berdasarkan beberapa uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah dengan judul : **“Fungsi Lurah Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu : “Bagaimana Fungsi Lurah Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui Fungsi Lurah Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”.



1. TINJAUAN PUSTAKA

Teori/Konsep Administrasi Negara

Negara adalah suatu kelompok, persekutuan, alat organisasi, kewilayahan/kedaerahan, sistem politik, kelembagaan dari suatu rakyat, keluaraga, desa, baik yang terdiri dari orang-orang yang kuat maupun yang lemah yang merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan bahkan sistem pemaksaan sehingga pada akhirnya diharapkan akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam dan luar negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak.

Menurut The Liang Gie, Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Syafie, 2010:14).

Menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dari pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam Syafie, 2010:14).

Menurut Waldo, bahwa Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (dalam Syafie 2010:24).

Teori /Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Simamora (dalam Wibowo, 2013:2), manajemen sumber daya manusia adalah hal-hal berkaitan dengan pembinaan, penggunaan dan perlindungan sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah mengelola unsur-unsur manusia dengan segala potensi yang dimiliki sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang dapat mencapai tujuan organisasi.

Menurut Faustino (dalam Masram, 2017:2), manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu manajer harus menjamin bahwa perusahaan atau suatu organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat ditempat yang tepat, dan pada saat yang tepat, yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan menolong perusahaan tersebut mencapai sarana-sarana secara keseluruhan efektif dan efisien.

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun dari tujuan MSDM terdiri dari empat tujuan, yaitu :

1. Tujuan Organisasional
2. Tujuan Fungsional



3. Tujuan Sosial
4. Tujuan Personal

Teori/Konsep Organisasi

Menurut Mahsun (2013:1), organisasi sering dipahami sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Kumpulan pedagang, kumpulan mahasiswa, kumpulan pegawai, kumpulan pengusaha dan bahkan kumpulan para pengangguran pun merupakan suatu organisasi jika mereka mempunyai tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai bersama.

Menurut Weber menjelaskan pengertian organisasi merupakan tata hubungan social, dimana setiap individu yang melakukan kerjasama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya (Silalahi 2011:124).

Menurut Robbins (dalam Edison dkk, 2016:49) organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk dicapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Teori/Konsep Evaluasi

Menurut Vedung (dalam buku Firyal & Widya, 2018:6) evaluasi berkaitan dengan intervensi pemerintah yaitu perubahan sosial politik dan administratif yang direncanakan misalnya kebijakan publik, program publik, dan layanan publik.

Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah mampu diraih melalui tindakan dari kebijakan public, memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target; memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan (Nugroho, 2014).

Kemudian menurut Dunn, evaluasi kebijakan mempunyai dua aspek yang paling berhubungan, yaitu penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan program dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil. Dunn selanjutnya membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga berdasarkan waktu evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan sesudah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan umumnya disebut pula sebagai evaluasi proses, sementara evaluasi setelah kebijakan diimplementasikan, disebut sebagai evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan atau evaluasi dampak pengaruh (*outcome*) kebijakan, atau disebut juga sebagai evaluasi sumatif.

Tahap evaluasi menurut Dunn dalam Nugroho (2014) menyebutkan ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni :

1. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*)



2. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*)

3. Evaluasi Proses Keputusan Teoritis (*Decision Theoretic Evaluation*)

Menurut Dunn dalam Nugroho (2014) mengembangkan indikator atau kriteria evaluasi mencakup enam indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasional teknis, selalu di ukur dari unit atau layanan atau nilai moneter (Dunn dalam Nugroho, 2014:429).

2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalita ekonomi, merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan (Dunn dalam Nugroho, 2014:430).

3. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn dalam Nugroho, 2014:430).

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Menurut (Dunn dalam Nugroho, 2014:434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat hubungan dengan rasional legal dan sosial, dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

5. Responsivitas

Menurut Duun dalam Nugroho, (2014:437) menyatakan bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

6. Ketepatan

Dalam proses ini keberhasilan dapat dilihat dari tujuan yang benar-benar tercapai berguna dan dinilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi tersebut.

Teori/Konsep Kinerja

Mangkunegara (dalam Pasolong, 2017:204), pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya

Menurut Fahmi (2015:2) kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu priode waktu. Secara lebih tegas Amstrong dan Baron (dalam Fahmi, 2015:2) mengatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi (*strategic planning*) suatu organisasi.



Dalam konteks manajemen, pengertian kinerja menurut Amstrong (dalam Hery, 2020:2) adalah sebuah proses sistematis untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan mengembangkan kinerja individu dan tim sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dengan memahami dan mengelola kinerja dalam rangka kerja yang disepakati tentang tujuan yang terencana, standar dan persyaratan kompetensinya.

Penilaian kinerja atau prestasi kerja (performance appraisal) Mengginston dan Mangkunegara (2005) adalah suatu proses yang digunakan oleh pimpinan sebagai dari bentuk evaluasi terhadap kinerja untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaan dengan baik atau tidak, apakah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Teori/Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut Amirullah (2015:167) adalah orang yang memiliki wewenang untuk memberi tugas, mempunyai kemampuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain dengan melalui pola hubungan yang baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara umum pengertian kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang menggerakkan perjuangan atau kegiatan yang menuju sukses.

Menurut James M. Black (dalam Sadili Samsudin 2006:287) Kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan dan menggerakkan orang lain agar mampu bekerja sama dibawah kepemimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk memahami definisi kepemimpinan secara lebih dalam, ada beberapa definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu :

- a. W. Griffin mengatakan, pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan, pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin.
- b. Steffen P. Robbins mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah tercapainya tujuan.
- c. Richard L. Daft mengatakan, kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan.

Teori/Konsep Ketentraman dan Ketertiban

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain mendefinisikan bahwa : “Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan. Ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan”.

Pengertian Ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata mendefinisikan bahwa : “Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan”.

Ketertiban umum dalam arti sempit menurut Yahya Harahap (2013) yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggaran/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran



terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan Perundangan-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Ketertiban umum dalam arti luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini an tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri.

Tugas dan Fungsi Lurah

Menurut pasal 1:5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

Pasal 7 PP Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan menyebutkan : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Dalam pasal 8 ayat 1 pemimpin satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ayat 2 setiap pemimpin satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing. Kepala kelurahan juga mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan Walikota;
- c. Urusan pemerintahan dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- d. Pelimpahan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;
- e. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Bupati atau Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa :

1. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
2. Kelurahan merupakan unit setingkat dengan desa.



3. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
4. Lurah diangkat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
5. Syarat-syarat lurah meliputi :
 - Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
 - Masa kerja minimal 10 tahun.
 - Kemampuan tekhnis dibidang administrasi pemerintahan dan
 - Memahami keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

Sementara itu dalam pasal 4 dan 5 dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa :

- Pasal 4
 - (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (2) Selain tugas, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.
 - (3) Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
 - (4) Pelimpahan urusan pemerintahan disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
 - (5) Pelimpahan urusan pemerintahan ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- Pasal 5
 - (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2018;213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.

Karakter khusus penelitian kualitatif berupaya mengungkap keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupannya sehari-hari secara komprehensif dan rinci. Pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, dan masyarakat. Setelah semua data yang diperlukan



diperoleh, kemudian disusun sedemikian tepat dan akan dianalisis dengan cara memberikan gambaran secara umum dengan disertai uraian dan penjelasan berdasarkan hasil penelitian.

4. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dari berbagai informasi mengenai Evaluasi Fungsi Lurah Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan bahwa indikator Efektivitas di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sejauh ini sudah terlaksana dengan baik, sebab yang terlibat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melibatkan semua masyarakat yang ada di Kelurahan Simpang Tiga. Menurut pengamatan penulis tentang indikator efektivitas yang dilakukan lurah beserta stafnya di kelurahan Simpang Tiga masih terdapat kekurangan yang mana efektivitas berperan penting dalam hal kegiatan kelurahan baik itu untuk lurahnya sendiri maupun bagi masyarakatnya. Alangkah baiknya dari pihak kelurahan untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat, lebih menampung demi kesejahteraan bersama. Dalam hal menjaga ketentraman kelurahan Simpang Tiga sudah terlaksana dengan baik dalam kegiatannya yang mana mereka mulai dari pihak kelurahan maupun masyarakat mau bersama menjaga ketentraman itu. Dalam indikator Efisiensi di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sejauh ini cukup terlaksana dengan baik, sebab masih ada beberapa yang belum terlaksanakan. Mengenai perihal pelayanan yang diberikan staf kantor Kelurahan Simpang Tiga sudah cukup memuaskan, karena mereka tidak membedakan masyarakat. Menurut pengamatan penulis tentang analisis efisiensi pelayanan yang ada di kelurahan simpang tiga sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada terdapat beberapa kekurangan baik itu dari lurahnya sendiri maupun dari staf atau pegawainya. Dalam hal pelayanan pihak kelurahan sudah memberikan yang terbaik mereka tidak memilih-milih masyarakat dalam hal pelayanan semuanya mereka sama rata. Yang menjadi masalah dalam hal ini, yaitu tentang para pedagang yang masih berjualan disekitaran trotoar di Kelurahan Simpang Tiga akibatnya menghambat aktifitas masyarakat yang hendak melewati trotoar. Dalam indikator Kecukupan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sejauh ini sudah baik, sebab perihal kecukupan dilihat dari seberapa jauh tingkat efektivitas dan efisiensi yang berlaku yang mana itu akan menjadi suatu kepuasan untuk nilai plus atau kesempatan yang menumbuh adanya suatu keberhasilan yang diraih. Menurut pengamatan penulis tentang analisis kecukupan tugas dan fungsi lurah yang mana dalam hal ini sudah dikategorikan bagus dari pihak lurah sudah memberikan dan menjalani tugasnya sebagaimana mestinya. Apabila dalam hal yang lain masih terdapat beberapa kekurangan atau masih terdapat ketidakpuasan masyarakat itu kembali kepada bagaimana masyarakat menilai, tetapi sejauh ini tugas dan fungsi lurah sudah berjalan cukup baik. Dalam indikator Perataan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sejauh ini sudah baik karena Perataan dapat diartikan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh, baik itu dari pihak Kelurahan ataupun pedagang dan masyarakat. Perataan dapat diartikan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh. Menurut pengamatan penulis tentang analisis perataan yang berlaku di kelurahan simpang tiga, yang mana dalam pelayanan tidak terdapat perbedaan dalam hal memberikan pelayanan, diberlakukan sama rata. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pihak kelurahan sudah melakukan tugasnya dengan baik, mulai dari masalah ketentraman, pelayanan serta



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

masalah pemerataan tidak ada pembedaan sama sekali berarti pihak kelurahan sudah berlaku adil untuk masyarakatnya. Dalam indikator Responsivitas di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sejauh ini sudah cukup baik, karena Respon yang diberikan pihak Kelurahan bisa di terima oleh masyarakat. Menurut pengamatan penulis terhadap responsivitas kelurahan simpang tiga masih terdapat kekurangan karena dapat dikatakan masih ada beberapa masyarakat kelurahan simpang tiga yang belum mengikuti aturan dari pihak kelurahan, walaupun sebagian masyarakat juga sudah mengikuti aturan yang berlaku. Tetapi sejauh ini masalah ketertiban sudah dapat dikatakan cukup baik. Dalam indikator Ketepatan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sejauh ini masih kurang baik, sebab tugas dan fungsi lurah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masih belum di laksanakan dengan tepat. Mencakup seberapa besar keberhasilan yang didapat dalam hal melaksanakan suatu perintah atau kegiatan, yang mana keberhasilan dapat dilihat dari hasil perencanaan pihak Kelurahan tergantung kepada visi dan misinya berjalan baik atau tidak. Menurut pengamatan penulis tentang analisis ketepatan lurah mencapai tujuan yang telah diatur dan dirancang berdasarkan perintah pemerintah masih terdapat beberapa kekurangan, karena dalam proses pelaksanaannya masih terdapat kekurangan mulai dari cara penanganannya hingga cara kerja pegawai ini lah yang menjadi kendala masih adanya beberapa kekurangan dalam hal yang ingin dicapai.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan tentang Evaluasi Fungsi Lurah dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat diketahui bahwa Evaluasi Fungsi Lurah dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Simpang Tiga masih di kategorikan cukup baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah rabbil'alamiin pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan lancar dan selalu dalam lindungan-Nya, semoga ini menjadi salah satu langkah untuk menuju kesuksesan dan meraih cita-cita besarku.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk cahaya hidupku ayahanda Eriantoni (alm) dan ibunda Masriani tercinta yang selalu memberiku semangat dan memanjatkan do'a kepada putrimu dalam setiap sujudmu, terima kasih untuk ayah dan ibu pengorbananmu sungguh luar biasa yang selalu menjadi kekuatanku, juga kakakku dan adikku serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada saya.

Untuk para sahabat yang sama-sama berjuang Melda Sahara, Tania Amelia Putri, Dwi Maya Lestary, Desnita, Dani Sajia, Ria Amelia terima kasih kalian selalu ada untukku sampai di titik ini. Dan terima kasih juga kepada orang terdekat yang telah mendukung, serta selalu memberikan support hingga sampai saat ini.

Terima kasih Bapak Dr. H. Nopriadi, S.KM., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Sahri



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Muharam, S.Sos M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Sarjan M, S.Sos M.Si selaku Pembimbing II serta Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Faried. 2015. *Teori dan Konsep Administrasi*. Four Edition. Jakarta. Rajawali Pers.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Penerbitan CV Pustaka
- Anwar, Prabu, Mangkunegara. 2005. *Prilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung. Refika Aditama.
- Burdiarjo, Mirian. 2010, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dessler, Grey. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Selemba Empat
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Khomariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung.
- Handoko, T, Hani, 2011. *Manajemen edisi kedua*. Yogyakarta BPFE. Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, H. Melayu SP, 2013. *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, Jakarta, Bumi Aksara.
- Kencana, Inu Syafii, 2005. *Sistem Administrasi Negara*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kencana, Inu Syafii, 2010. *Ilmu Administrasi Publik. Pengertian Administrasi*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Pasolong, Hebani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Ridwan, 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Gafindo Persada. Jakarta.
- Silalahi, Ulbert. 2011. *Asas-asas Manajemen*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2020. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan : Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik (Konsep dan Perkembangan ilmu di Indonesia*. Graha Ilmu : Gudang.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- W.J.S, Poerwadarminta. 1998. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Ketentuan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Mengenai Kelurahan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kelurahan.

C. Dokumentasi Sumber-Sumber Lain

- Pedoman penyusunan Tugas Akhir (SKRIPSI) Tahun 2019.
(<http://repository.unpas.ac.id/28839/3/BAB%20II.pdf>), Accessed on Desember 01 2021.
(<http://repository.uin-suska.ac.id/4758/3/BAB%20II.pdf>), Accessed on Desember 01 2021.
<https://kbbi.web.id.id/organisasi>



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

https://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2021/11/E-J-2.pdf